

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang telah dilakukan berdasarkan evaluasi RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2006-2008 dan berdasarkan sektor basis dengan satuan PDRB dan jumlah tenaga kerja, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi (RPJMD) Propinsi Jawa Timur sudah mempertimbangkan peranan faktor ekonomi khususnya sektor basis daerah, karena perbedaan antara hasil identifikasi RPJMD Propinsi Jawa Timur dan hasil analisis *economic base* (khususnya dalam struktur pengembangan wilayah) tidak terlalu menonjol. Hal ini berarti pertimbangan faktor ekonomi dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur ternyata lebih besar (dominan) daripada faktor sosial, politik dan kepentingan (*interests*).
2. RPJMD Propinsi Jawa Timur menetapkan tiga kebijakan pembangunan wilayah, antara lain pemenuhan kebutuhan dasar rakyat; menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; dan peningkatan aksesibilitas masyarakat.
3. Sektor basis yang diakomodasi di dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur, khususnya dalam penentuan sektor prioritas di Kawasan Andalan meliputi sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; dan sektor jasa.
4. Sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor yang berbasis *utility* (sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan) tidak diakomodasi di

dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur, khususnya dalam penentuan sektor prioritas di Kawasan Andalan karena output dari sektor-sektor tersebut tidak bisa diekspor dan outputnya hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam suatu daerah saja, sehingga sektor-sektor tersebut tidak diakomodasi.

5. Orde perkotaan berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur yang didasarkan pada variabel jumlah penduduk tidak konsisten dan mengalami bias struktur keterkaitan antar wilayah, karena orde perkotaan menurut RPJMD Propinsi Jawa Timur tidak bisa menjelaskan keterkaitan wilayah (aksesibilitas) dan arus barang antar daerah. Orde perkotaan berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur hanya menggunakan variabel jumlah penduduk saja, sedangkan orde perkotaan menurut analisis *economic base* tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk saja, tetapi juga didasarkan pada keterkaitan pembangunan daerah (aksesibilitas), arus barang antar daerah, dan pusat pertumbuhan (*growth pole*).

## 5.2 Saran

Dari hasil temuan-temuan dari studi ini, maka dapat ditarik suatu saran atau implikasi kebijakan sebagai berikut:

1. Sektor basis dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Jawa Timur (RPJMD Propinsi Jawa Timur) dengan mengisolasi/mengabaikan faktor sosial, politik, dan kepentingan (*interests*).
2. Perlu tambahan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Jawa Timur (RPJMD Propinsi Jawa Timur), khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur, dengan menggunakan metode LQ pendekatan sosial, misalnya dengan teknik penghitungan basis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan teknik penghitungan basis dengan pendekatan lainnya.
3. Perlu menambahkan pertimbangan faktor sosial, politik, dan kepentingan (*interests*) dalam menyusun perencanaan pembangunan (RPJMD) Propinsi Jawa Timur, khususnya dalam hal penentuan kebijakan pembangunan, strategi dan struktur pengembangan wilayah Jawa Timur.